PEMBERITAAN MEDIA

EDISI
28 Juni – 4 Juli 2021

Komitmen Iklim

Sektor Energi dan Kehutanan Kunci Mencapai Target NDC

- Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen melalui kerjasama internasional pada tahun 2030. Sektor energi dengan target sebesar 11 persen merupakan sektor utama yang memegang peran penting dalam pencapaian NDC Indonesia setelah sektor kehutanan, yaitu sebesar 17 persen.

- Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK, Agus Justianto, menyampaikan bahwa sinergi energi dan perubahan iklim merupakan kata kunci yang harus dimaknai sebagai upaya bersama dalam membentuk transisi energi secara inklusif.

"*Kita semua dapat menjadi aktor dan berperan aktif dalam transisi tersebut. Kesadaran untuk meminimalkan penggunaan sumber energi fosil dengan mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan akan memberikan kontribusi positif dalam menekan perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya*"

KLHK menyampaikan bahwa sektor energi dan kehutanan menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC).

- Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Ditjen PPI KLHK, Emma Rachmawati

"*Kalau kita bisa menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan sektor kehutanan maka NDC kita sudah pasti dapat tercapai sesuai dengan apa yang ditargetkan*"

- Sektor energi adalah sektor kedua yang merupakan kontributor terbesar emisi gas rumah kaca di Indonesia. Di saat yang bersamaan, sektor energi juga menjadi kontributor kedua dalam menurunkan emisi GRK sehingga perlu melakukan upaya signifikan dalam mengurangi emisi GRK.

- Merujuk peta jalan NDC Indonesia, sektor energi ditargetkan menyumbang sebesar 314 juta CO2e (ekuivalen karbon dioksida) untuk penurunan emisi gas rumah kaca pada 2030.

- Target itu kemudian dirinci ke dalam subsektor energi efisiensi. Dari masing-masing subsektor itu di tetapkan juga dalam bentuk CO2e.

- Indonesia telah menetapkan implementasi The first NDC pada 1 Januari 2021. Saat ini, KLHK bersama kementerian dan pihak terkait sudah berprogres menyusun updated NDC yang disetarakan dengan Katowice Package, serta penyusunan dokumen Long Term Strategy - Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050 sebagai arahan yang akan menjadi masukan untuk Global Stock-take tahun 2023 dan selanjutnya transparansi laporan NDC di tahun 2024 menuju pencapaian target NDC 2030.

- Dan fokus dalam subsektor power karena sangat dominan dalam penurunan emisi GRK di sektor energi. Selain itu Carbon Capture and Storage (CCS), Carbon Capture and Utilization (CCU), mobil listrik, dan B30 akan membantu mempercepat transisi energi dan pencapaian Net Zero Emission. Penetapan kebijakan menjadi basis kunci penentuan target-target ke depan yang lebih ambisius lagi.

- ***Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha***, menyampaikan bahwa dalam NDC, sektor energi ditargetkan menyumbang penurunan emisi sebesar 314 juta ton CO2e pada tahun 2030 tanpa bantuan asing. Di sisi lain, target pengurangan emisi dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yaitu sekitar 745 juta ton CO2e di tahun 2030. Ini dikarenakan adanya permintaan yang berbeda yang disebabkan asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi yang berbeda pula.

- DEN diamanahkan Presiden untuk membuat Grand Strategi Energi Nasional yang diharapkan dapat memperbaharui RUEN dengan mempertimbangkan faktor kekinian. NDC dan RUEN akan disinkronisasikan, walau dengan time frame yang berbeda, tetapi arahnya sama yaitu untuk mempertajam pengurangan emisi GRK, dengan mempertimbangkan asumsi makro yang sama sehingga demand juga sama.

Indonesia sudah mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat terkait upaya pencapaian nol emisi karbon atau zero net carbon emission pada 2060 mendatang.

- ***Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto*** mengatakan nanti akan segera datang utusan Presiden Amerika Serikat ke Indonesia untuk menindaklanjuti dukungan pengurangan emisi karbon ini.

"*Sebagai follow up soal climate change dan lingkungan, nanti ada utusan Biden (Presiden Amerika Serikat), John Kerry, akan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat untuk menindaklanjuti rencana kerja samanya*"

- Kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat sangat baik dalam hal lingkungan dan penurunan emisi karbon. Indonesia juga telah membuat komitmen melalui Paris Agreement dengan targetnya pada 2030 penurunan emisi karbon mencapai 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional.

- Kerja sama dengan AS ini merupakan bagian dari upaya dalam mencari dukungan internasional untuk mencapai target pengurangan emisi karbon sebesar 41% pada 2030 tersebut.

- Sebelumnya, ***Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan*** mengatakan target Indonesia adalah nol emisi karbon pada 2060. Salah satu langkah kongkrit sudah mulai diambil adalah keputusan PLN untuk moratorium pembangunan PLTU bertenaga batu bara mulai 2023.

Paris Agreement

Lima Negara Yang Menjadi Ancaman Gagalnya Paris Agreement

- Laporan terbaru **Think Tank Carbon Tracker Initiative** dalam judul laporan **Do Not Revive Coal** menyebutkan bahwa ada 5 negara yang menjadi ancaman gagalnya Paris Agreement.
- Ancaman tidak tercapainya target Perjanjian Paris ini berasal dari lima negara yaitu Jepang, Indonesia, India, Vietnam, dan Tiongkok.
- Alasan utama ancaman gagalnya Perjanjian Paris ini karena persoalan rancangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Kelima negara ini berencana membangun 600 PLTU batu bara baru yang mencakup sekitar 80 persen dari porsi batu bara baru global. Kapasitas dari seluruh PLTU itu melebihi 300 gigawatt (GW).
- Hal ini dianggap mengkhawatirkan, karena tak menghiraukan seruan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres untuk membatalkan PLTU batu bara baru.

- Pasalnya, negara **Jepang, Indonesia, India, Vietnam**, dan **Tiongkok** mengoperasikan 3/4 PLTU yang ada di seluruh dunia. Sebanyak 55 persen adalah negara Tiongkok dan 12 persen adalah India. Sekitar 27 persen kapasistas PLTU batu bara global tidak dapat menghasilkan keuntungan, dan 30 persen hampir mencapai titik breakeven. Indonesia sendiri masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan penggunaan PLTU batu bara ini. Di mana kapasitasnya mencapai 45 GW dan 24 GW pembakit baru sudah direncanakan untuk dibangun.

- Energi terbarukan ditargetkan akan mengalahkan seluruh tambang baru yang ada pada tahun 2024. PT Pembangkit Listrik Negara (PLN Persero) sendiri masuk ke dalam daftar perusahaan dengan aset yang terancam menjadi aset terlantar dalam skema B2DS (Below 2 Degrees). Dari 22,529 MW kapasitas, PLN berisiko kehilangan 15,41 miliar USD miliar dari asset terbengkalai dengan patokan B2DS.

- Ada fakta menarik dari laporan **Do Not Revive Coal** tersebut. Bahwa di masa depan biaya operasi PLTU yang dinilai akan lebih mahal dibandingkan dengan energi bersih terbarukan.

- Pada tahun 2024, biaya Energi Terbarukan (ET) akan lebih murah dibandingkan pembangkit batu bara di seluruh dunia. Sedangkan, pada tahun 2026, pengoperasian PLTU batu bara yang ada 100 persen lebih mahal dibandingkan pengoperasian Energi Terbarukan.

- Dengan adanya kompetisi dari Energi Terbarukan dan regulasi yang semakin ketat, maka diproyeksikan PLTU batu bara akan semakin tidak menguntungkan. Jika target Perjanjian Paris tercapai, sekitar 220 triliun US Dollar PLTU batu bara global yang sudah beroperasi beresiko menjadi aset terbengkalai (*stranded assets*). Sekitar 80 persen PLTU batu bara global yang sudah beroperasi dapat digantikan oleh pembangkit Energi Terbarukan yang lebih hemat biaya.

- Head of Power and Utilities Carbon Tracker mengatakan 92 persen proyek PLTU baru yang direncanakan secara ekonomis tidak menguntungkan. Selain itu, dana perkiraan investasi pembangunannya mencapai 150 triliun US Dollar bakal terbuang sia-sia walaupun dalam keadaan business as usual (BAU).

- Dampak buruk PLTU Batubara PLTU batu bara yang tersebar dan beroperasi di Indonesia, melepaskan jutaan ton polusi setiap tahunnya. Dari waktu ke waktu PLTU-PLTU tersebut diyakini mengotori udara yang kita hirup dengan polutan beracun. Adapun, polutan yang dihasilkan bisa berupa merkuri, timbal, arsenik, kadmium dan partikel halus namun beracun, yang telah menyusup ke dalam paru-paru kita. Oleh karena itu, polusi udara atau polutan ini dianggap sebagai pembunuh senyap yang menyebabkan 3 juta kematian dini di seluruh dunia.

- Tidak hanya itu, penyakit yang bisa terdampak dari polutan beracun akibat operasi PLTU batu bara ini seperti risiko kanker paru-paru, stroke, jantung dan penyakit pernapasan. Bahkan, tidak hanya berdampak langsung pada kesehatan manusia saja, sektor lainnya yang dirugikan selain kesehatan adalah pertanian, perikanan, lingkungan dan perekonomian masyarakat.
- Sementara, sektor energi sendiri memiliki target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 314 juta ton di tahun 2030 mendatang. Penambahan PLTU batubara ini akan berpotensi mengunci emisi gas rumah kaca selama 40 tahun mendatang, sebab masa operasional PLTU ini berlangsung selama itu.
- Adila Isfandiari, Peneliti Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia mengatakan bahwa penambahan PLTU batubara sangat bertolak belakang dengan komitmen penanggulangan krisis iklim. Di mana tren global berupaya mengurangi jumlah PLTU baru.

Pembauran Energi

Inggris Akan Mempercepat Target Penghentian Penggunaan Batu Bara

- Mulai 1 Oktober 2024, Inggris tidak akan lagi menggunakan batubara untuk menghasilkan listriknya. Ini satu tahun lebih cepat dari rencana awal. Hal ini diumumkan oleh Menteri Energi dan Perubahan Iklim Inggris, Anne-Marie Trevelyan, pada Rabu, 30 Juni.

- Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Inggris untuk melakukan transisi dari bahan bakar fosil dan dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan dalam rangka menghapus peran serta Inggris terhadap perubahan iklim pada 2050. Pengumuman ini menegaskan niatan yang disampaikan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson tahun lalu untuk mempercepat tenggat waktu mengakhiri penggunaan batu bara dalam sistem produksi listrik.

- Ini juga berarti bahwa Pemerintah Inggris mempercepat batas waktu penghapusan batu bara dari sistem energi Inggris satu tahun lebih cepat. Tekad ini menegaskan kepemimpinan Inggris untuk bergerak lebih jauh dan lebih cepat dalam menurunkan emisi serta memimpin dengan memberikan keteladanan dalam memerangi perubahan iklim jelang perannya menjadi tuan rumah COP26 di Glasgow pada November mendatang. Inggris mengajak negara-negara di dunia untuk turut mempercepat penghapusan batubara dari sistem ketenagalistrikan.

- Pemerintah Inggris akan mengeluarkan undang-undang baru berkenaan dengan hal ini sesegera mungkin. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil yang tergolong karbon intensif dan berdampak pada polusi udara. Dengan tidak lagi menggunakan batu bara dalam sistem ketenagalistrikannya, Inggris dapat memastikan hal tersebut akan memainkan peran penting dalam menjaga kenaikan temperatur global ke 1,5 derajat – target utama dalam presidensi COP26-nya.

- Inggris telah membuat capaian besar dalam mengurangi penggunaan batu bara pada sektor ketenagalistrikan, dengan batu bara hanya mengisi 1,8 persen dari total bauran pembangkitan listrik Inggris pada 2020, dibandingkan dengan 40 persen pada satu dekade lalu.

- Pengumuman ini disampaikan sebelum Menteri Anne-Marie Trevelyan berbicara dalam Konferensi Powering Past Coal Alliance (PPCA) wilayah Eropa pekan ini mengenai pentingnya negara-negara secara kolektif meninggalkan pembiayaan batubara dan bagaimana perusahaan dapat menjalankan komitmen tersebut, sebagai bagian dari London Climate Action Week. Pemerintah Inggris telah mengakhiri dukungannya terhadap sektor energi berbahan bakar fosil di luar negeri sejak awal tahun ini.

- Inggris berhasil memproduksi listrik tanpa batubara selama 5.000 jam pada 2020 (setara dengan sekitar 7 bulan), dan pada awal tahun ini mencetak rekor baru dalam pembangkit listrik tenaga angin, dengan lebih dari sepertiga energinya berasal dari angin. Kenaikan penggunaan sumber energi terbarukan tentu tidak terlepas dari kompetisi, usaha bebas dan insentif pemerintah dalam memulai teknologi baru ini yang kemudian membantu menurunkan harga energi hijau, dan batubara sekarang menjadi lebih mahal di kebanyakan negara.

- Sebagai salah satu negara pertama yang berkomitmen mengakhiri penggunakan batubara ditambah dengan kesuksesannya dalam mengembangkan energi terbarukan secara signifikan, Inggris memimpin dunia meninggalkan bahan bakar fosil dan dengan sangat baik melakukan dekarbonisasi dalam sistem energinya.

- Melalui presidensi COP26-nya, Pemerintah Inggris mengajak negara-negara di dunia mengikuti langkah Inggris dan meninggalkan batubara selamanya. Pada bulan Mei lalu, di bawah kepemimpinan Inggris, Menteri-Menteri Iklim dan Lingkungan negara G7 setuju untuk mengakhiri semua pembiayaan baru pada sektor batubara pada akhir 2021 dan mempercepat transisi dari batubara menuju sistem ketenagalistrikan yang terdekarbonisasi pada 2030-an.

- Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins mengatakan bahwa berkaca pada pengalaman Inggris yang menggunakan batu bara sebanyak 40 persen dalam sektor ketenagalistrikan pada 2012, dan kemudian nol persen pada 2024, menunjukkan bahwa transisi yang cepat sangat mungkin untuk dilakukan.
- Percepatan ini menunjukkan bahwa Inggris dapat mengurangi ketergantungannya terhadap batu bara pada sektor ketenagalistrikan dari sepertiga menjadi nol hanya dalam 10 tahun.
- Langkah itu akan membantu Inggris untuk melakukan pembangunan kembali yang lebih ramah lingkungan.

- Inggris menemukan bahwa angin adalah pengganti sumber energinya. Dan Indonesia memiliki potensi yang jauh lebih besar meliputi surya, angin, panas bumi, dan masih banyak lagi.
- Inggris berpendapat bahwa pengumuman target ambisius Pemerintah Indonesia untuk mengakhiri era batu bara dan rencana untuk menerapkan insentif terhadap energi terbarukan dan pajak karbon merupakan langkah besar yang akan menguntungkan seluruh rakyat Indonesia.
- Ini merupakan bagian dari gerakan global untuk meninggalkan batu bara. Total kapasitas batu bara yang dibatalkan sejak 2017 mencapai 4,5 kali lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang dibangun.
- Inggris merasa bangga dapat mendukung tekad Indonesia dalam transisi menuju energi rendah karbon masa depan yang berkelanjutan melalui program Mentari, yaitu program kerja sama Inggris dan Indonesia pada sektor energi rendah karbon.
- Program Mentari berfokus pada peningkatan peraturan yang kondusif bagi pengembangan energi terbarukan, memobilisasi investasi ke dalam proyek energi terbarukan, membuktikan konsep proyek energi terbarukan jarak jauh, dan membagikan keahlian serta berkolaborasi dengan berbagai kelompok kepentingan.

Pajak Karbon

- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menerapkan pajak karbon pada tahun 2022. Pajak karbon menjadi salah satu rencana yang tertuang dalam Revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang dibahas bersama DPR.

- Tarif pajak karbon masih didiskusikan hingga ke ranah internasional. Sri Mulyani bersama koalisi Menteri Keuangan dari berbagai negara masih mendiskusikan praktek penerapan harga yang lebih seragam.

"*Ini sebagai salah satu pembahasan kami, pimpinan dari koalisi Menteri Keuangan untuk perubahan iklim, bersama Finlandia membahas mengenai bagaimana praktek dari penerapan harga karbon yang lebih seragam sehingga menimbulkan kepastian*"

- Memang, tarif pajak karbon di dunia saat ini sangat tidak seragam karena berada pada rentang yang lebih luas.

- Di Jepang, pajak karbon dikenakan sebesar 3 dollar AS/ton CO2e. Sedangkan di Perancis tarifnya mencapai 49 dollar AS/ton CO2e. Sementara di Spanyol, tarif pajak karbon yang dikenakan mencapai 17,48 dollar AS/ton CO2e untuk semua sektor emisi gas rumah kaca (GRK) dari gas HFCs, PFCs, dan SF6. Di Kolombia, tarifnya sebesar 4,45 dollar AS/ton CO2e untuk semua sektor.

- Menurut hitungan para ahli perubahan iklim, harga dari CO2 itu seharusnya mencapai 120 dollar AS per ton pada tahun 2030
- Penerapan pajak karbon di Indonesia menjadi sangat krusial lantaran merupakan negara kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim ini mengakibatkan kenaikan air laut dan mengancam penenggelaman pulau.
- Di sisi lain, belanja negara untuk mengurangi GRK sangat mahal. Kebutuhan pembiayaan mitigasi perubahan iklim rata-rata memerlukan dana hingga **Rp 266,2 triliun per tahun**, sesuai **Second Biennial Update Report.**
- Sedangkan selama 5 tahun terakhir pada periode 2016-2019, rata-rata alokasi anggaran perubahan iklim di APBN mencapai **4,1 persen per tahun**. **APBN berkontribusi** sekitar **32,6 persen per tahun** dari total kebutuhan biaya mitigasi, dengan **realisasinya** rata-rata mencapai **Rp 86,7 triliun per triliun**.

Pajak Karbon RI Rp 75/kg Jauh dari Rekomendasi Bank Dunia

- Rencana pemberlakuan pajak karbon tahun depan dengan tarif minimal Rp 75 per kilo gram (kg) karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara masih jauh dari rekomendasi Bank Dunia

- ***Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa*** menilai, usulan besaran pajak karbon minimal Rp 75 per kg tersebut masih jauh dari rekomendasi Bank Dunia dan IMF.

- Bank Dunia maupun IMF merekomendasikan pajak karbon untuk negara berkembang berkisar antara US$ 35 - US$ 100 per ton atau sekitar Rp 507.500 - Rp 1,4 juta (asumsi kurs Rp 14.500 per US$) per ton.

"Dari sisi harga, sejumlah rekomendasi menyatakan untuk carbon pricing yang ideal berkisar antara US$ 35 sampai dengan US$ 100/ton, sehingga benar-benar efektif dampaknya. Jadi, dengan harga Rp 75/kg seperti yang diusulkan, masih jauh dari rekomendasi World Bank atau IMF untuk negara berkembang"

- Fabby menyarankan agar harga karbon disesuaikan dengan target untuk mencapai emisi nol (net zero emission) Indonesia pada 2050 dan kebutuhan investasi untuk melakukan transformasi sistem energi menuju net zero emission. Dan agar pajak karbon ini tidak hanya semata-mata untuk menambal APBN, tapi tidak efektif, tidak sesuai dengan tujuannya untuk mengurangi emisi karbon. Dan dalam membahas pajak karbon pemerintah harus terbuka dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, organisasi non-pemerintah (NGO), akademisi, dan para ahli.

DPR Sudah Menerima Usulan Perubahan RUU KUP Kelima

- ***Anggota DPR RI Komisi XI Andreas Eddy Susetyo*** mengaku DPR sudah resmi menerima usulan perubahan RUU KUP kelima dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM saat rapat di komisi XI pada senin, 28 Juni2021.

"Tahapannya saat ini sudah membentuk panitia kerja dan mulai minggu depan. Kami akan mengundang semua pihak yang terlibat dalam revisi UU termasuk pajak karbon. Semua asosiasi baik Gaikindo, Kadin, Apindo, Asoiasi Semen Indonesia"

- DPR mendukung penuh kebijakan karbon ini asal benar-benar bersemangat menjaga lingkungan hidup. Sehingga bisa mengendalikan emisi gas rumah kaca, mengubah perilaku ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara. "Tapi jangan sampai pemerintah hanya berniat memperoleh pendapatan dengan dalih penyelamatan lingkungan,"

- DPR meminta pemerintah membuat desain kebijakan yang tentunya di satu sisi bisa mencapai tujuan tersebut, tetapi tidak menimbulkan distorsi ekonomi.

"Kita juga akan menanyakan alternatif apa yang diberikan pemerintah dalam energi terbarukan, misalnya. Tapi intinya jangan sampai pajak karbon ini menurunkan daya saing kita. Karena kita tahun terciptanya undang-undanga ini seperti UU Cipta Kerja untuk menaikkan daya saing kita"

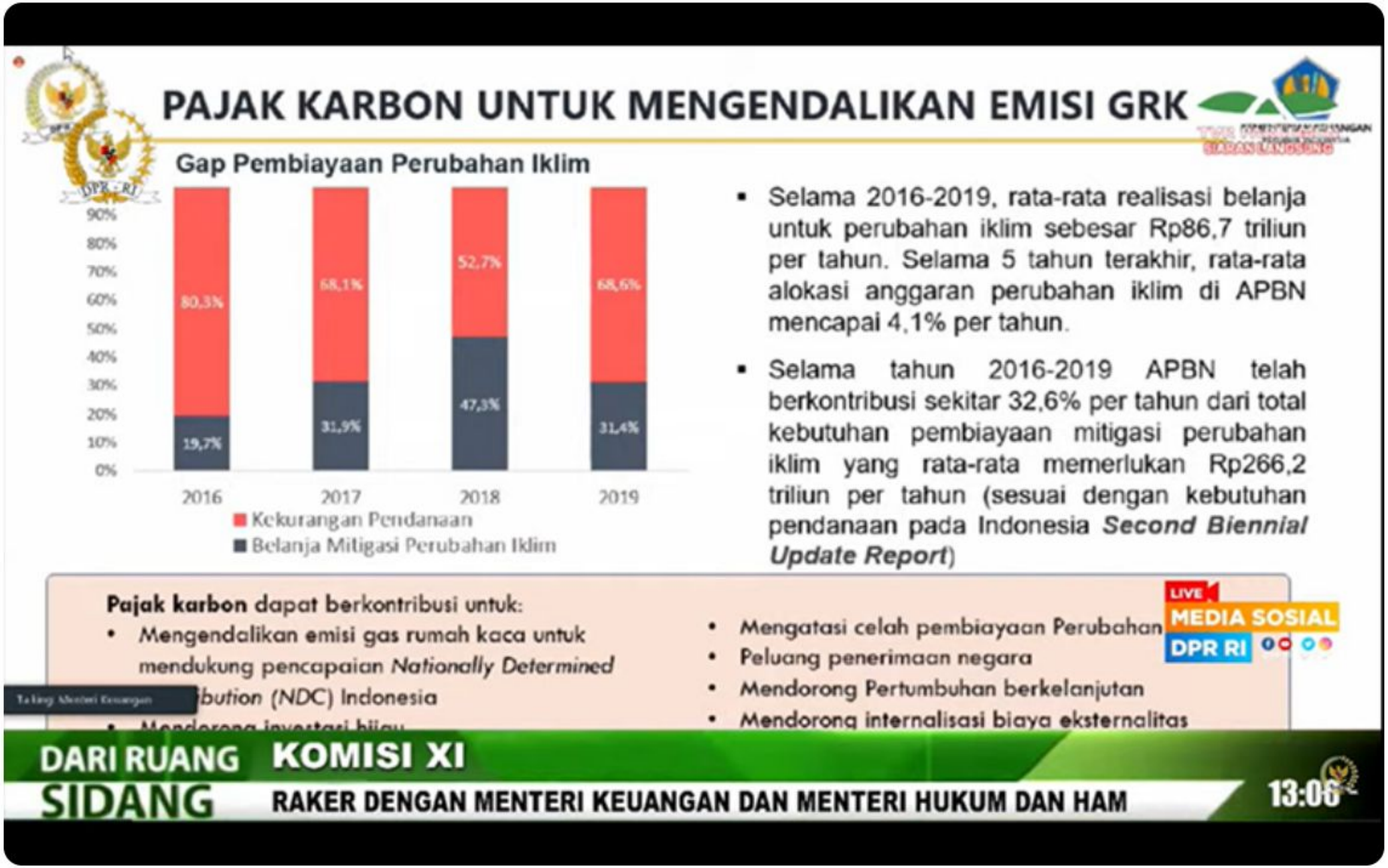

Salah satu bagian slide yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat bersama Komisi XI, Senin (28/6/2021).

Pajak Karbon Bakal Diterapkan, Pengusaha Masih Keberatan

- Pelaku industri semen khawatir mengenai rencana kebijakan pajak karbon tersebut.

- ***Technical Advisor Asosiasi Semen Indonesia Lusy Widowati*** menyampaikan penerapan pajak karbon ini di luar kesanggupan industi semen.

  "Kita tahu industri semen kelebihan pasokan 55 juta ton, utilitasi pabrik hanya berkisar rata-rata 62 persen, dan pabrik baru bahkan hanya 50 persen. Kondisi ini diperberat dengan pandem. Sehingga pertumbuhan semen pada 2020 menunjukkan minus 10,4 persen"

- Pajak karbon ini akan menurunkan daya saing di pasar regional dan global. Di ASEAN, Indonesia punya competitor semen besar, Thailand, Malaysia, Vietnam dan mereka tidak menerapkan pajak karbon.

- Jika pajak karbon senilai Rp 75 perkilogram, maka beban pajak yang harus dibayarkan industri semen sekitar 3,5 dolar perton/Rp 50 ribu perton dan harga ini hampir 10 persen dari harga jual klinter ekspor industri semen.

  "Bayangkan kita punya ekspor 12 juta ton, maka tambahan biaya pajak saja hampir 45 juta dolar, tidak termasuk dari kenaikan biaya produksi dari bahan bakar fosil sebagai bahan bakar utama pabrik semen. Di dalam negeri sendiri, pajak ini kami khawatir akan menjadi beban masyarakat karena semen akan naik. Sehingga potensi masyarakat semakin turun untuk membangun rumah dan proyek-proyek infrastruktur akan meningkat"

Pembagunan Rendah Karbon

Indonesia dan Perancis Sepakat Memperkuat Pembangunan Rendah Karbon

- Indonesia dan Perancis sepakat untuk memperkuat kerja sama pembangunan rendah karbon, green and blue economy, hingga kerja sama pembiayaan pembangunan proyek-proyek pemerintah.
- Disampaikan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat menerima kunjungan pejabat senior dari The Agence Française de Développement (AFD) dan pejabat senior dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan (French Treasury) di KBRI Paris, Prancis.
- Kementerian PPN/Bappenas telah menyiapkan strategi transformasi ekonomi. Kerja sama AFD dengan Kementerian PPN/Bappenas adalah salah satunya bentuk usaha untuk pelaksanaan strategi transformasi ekonomi Indonesia, khususnya green economy.
- Dalam pertemuan dengan AFD tersebut, terdapat kesepahaman untuk memperkuat kerja sama pembangunan rendah karbon atau green economy dengan fokus pada energy transition, waste management, green industry termasuk green tourism. Beberapa proyek potensial untuk dikembangkan adalah waste to energy project dan AFD juga akan mendukung penuh langkah Indonesia dalam mengusung pilot project pencanangan Bali sebagai blue island.

- Kementerian PPN/Bappenas akan memfasilitasi proyek potensial untuk dibiayai pinjaman AFD seperti eco-fishing port dan mass transit program khususnya di Bandung dan Medan.

- Pihak AFD menyampaikan bahwa dengan semakin eratnya kerja sama AFD dengan Indonesia serta banyaknya proyek-proyek kerja sama serta dalam rangka meningkatkan fleksibilitas operasional, ke depannya operasional kantor perwakilan AFD di Indonesia akan beroperasi sebagai institusi yang terpisah dari Kedutaan Besar Perancis di Indonesia.

- Kemudian dalam pertemuan dengan Kementerian Ekonomi dan Keuangan (French Treasury), pihak Perancis menyatakan dalam beberapa tahun terakhir fasilitas pinjaman French Treasury telah diimplementasikan untuk pembiayaan pembangunan pemancar televisi dan pembangunan Sistem Meteorologi di Indonesia.

- Pemerintah Indonesia ke depan juga masih mempertimbangkan pembiayaan dari pemerintah Perancis untuk beberapa proyek pemerintah mengingat kerja sama pembiayaan pembangunan kedua negara melalui fasilitas pembiayaan French Treasury sudah terjalin sejak lama.

- Beberapa potensi proyek-proyek pemerintah Indonesia untuk dibiayai French Treasury antara lain Pusat Data Nasional dan digitalization of broadcasting system. Proyek Pusat Data Nasional akan segera diimplementasikan dalam waktu dekat.

Sumber Pemberitaan

- https://id.berita.yahoo.com/inggris-percepat-target-penghentian-penggunaan-065751845.html
- https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/GKdJQJmb-indonesia-prancis-tingkatkan-kerja-sama-ekonomi-hijau?utm_source=desktop&utm_medium=terbaru&utm_campaign=WP
- https://ekonomi.bisnis.com/read/20210703/9/1413268/indonesia-dan-perancis-bahas-kerja-sama-green-economy-hingga-pusat-data-nasional
- https://www.cnbcindonesia.com/news/20210701103507-4-257349/isu-emisi-karbon-gak-main-main-utusan-biden-bakal-ke-ri
- https://money.kompas.com/read/2021/06/29/082448126/sri-mulyani-terapkan-pajak-karbon-tahun-2022-berapa-tarifnya?page=all
- https://news.ddtc.co.id/biayai-mitigasi-perubahan-iklim-sri-mulyani-usulkan-pajak-karbon-30893?page_y=2915.333251953125
- https://www.medcom.id/internasional/eropa-amerika/9K5QRExK-inggris-percepat-target-penghentian-penggunaan-batu-bara?p=2
- https://www.kompas.com/sains/read/2021/06/30/184500923/indonesia-dan-4-negara-lainnya-jadi-ancaman-gagalnya-perjanjian-paris-kok?page=all
- https://www.republika.co.id/berita/qvlhrp349/klhk-sinergi-dan-perubahan-iklim-kunci-transisi-energi
- https://www.antaranews.com/berita/2241310/klhk-sektor-energi-dan-kehutanan-kunci-indonesia-capai-target-ndc
- https://www.cnbcindonesia.com/news/20210701103507-4-257349/isu-emisi-karbon-gak-main-main-utusan-biden-bakal-ke-ri
- https://www.cnbcindonesia.com/news/20210629104207-4-256685/pajak-karbon-ri-rp-75-kg-jauh-dari-rekomendasi-bank-dunia
- https://bumninc.com/pajak-karbon-bakal-diterapkan-pengusaha-masih-keberatan/?showall

Madani